



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	PT CMNP dan PKK Jakut adakan pengobatan gratis		
Date	24 Feb 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	30	Article Size	
Journalist	Dimas Novita Sari	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► JALAN TOL DKI

# Konstruksi 6 Ruas Awal 2015

JAKARTA—PT Jakarta Tollroad Development memperkirakan pembangunan fisik proyek enam ruas jalan tol dalam Kota Jakarta baru dapat dilakukan secepatnya pada awal 2015, mengingat tahun ini merupakan tahun politik.

Dimas Novita S.  
dimas.novita@bisnis.id

Kepala Divisi Komunikasi JTD Ngurah Wirawan mengatakan keputusan tersebut ditimbang berdasarkan situasi Ibu Kota yang akan disubstitusikan dengan sejumlah agenda politik.

"Injeksi dalam sebuah investasi, kami harus melihat keberlangsungan proyek. Jangan sampai proyek berhenti di tengah jalan dan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar, seperti kemacetan dan sebagainya," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (23/2).

Selain itu, perusahaan juga masih membutuhkan waktu untuk memfinalisasi financial closing dengan pemberi pinjaman. Saat ini, JTD masih menajaki perjanjian kredit dengan sindikasi bank yang dipimpin oleh Bank Mandiri.

Ngurah menyampaikan beberapa syarat dan kondisi untuk perjanjian kredit masih terus dibahas hingga saat ini untuk ditelaah pada September mendatang.

"Jika penandatanganan PPJT [perjanjian pengusahaan jalan tol]-nya bulan depan, kemudian kami sambil bebaskan tanah, baru konstruksi di awal tahun depan," paparnya.

Adapun pencairan pinjaman baru akan diluncurkan keti-

ka proses konstruksi dimulai, sedangkan selama masa persiapan menuju konstruksi, manajemen akan mengalokasikan ekuitas sebagai modal dasar proyek tersebut.

Masih sesuai dengan rencana awal, pada tahap pertama, perusahaan akan membangun dua ruas prioritas terlebih dahulu yakni ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang yang akan dikerjakan secara simultan.

"Jadi Semanan-Sunter dulu. Itu butuh investasi Rp6 triliun. Sekarang ekuitas kami sudah siap Rp1 triliun gabungan dari para pemegang saham," jelas Ngurah.

Seperti diketahui, BUMD Jakarta, perusahaan jalan tol serta BUMN konstruksi bergabung dalam JTD. BUMD yang memiliki 78% saham JTD ialah PT Jakarta Propertindo, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk., PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., PT Jaya Real Property Tbk., dan PT Jaya Land.

Kemudian, PT Wijaya Karya Tbk., PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., PT Pembangunan Perumahan Tbk., PT Hutama Karya, dan PT Adhi Karya Tbk. menguasai saham sebesar 22%.

#### MASIH DISUSUN

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ach-

mad Gani Ghazaly menyampaikan saat ini PPJT masih disusun guna mengakomodasi kesepakatan antara pemerintah dan badan usaha mengenai pengusahaan proyek senilai Rp41,2 triliun itu.

Dua ruas prioritas akan dibangun terlebih dahulu.

Selain itu, perjanjian kredit JTD dengan sindikasi bank juga masih terus dikaji guna meyakinkan sindikasi bank dalam memberikan pinjaman. "Landasan drawdown [pencairan kredit]-nya belum ketemu."

Kendati demikian, Gani optimis proyek yang sempat ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tersebut dapat berjalan lancar, meskipun saat ini proyek modorer tengah mengalami masalah.

Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo menuturkan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut akan dimulai setelah pembangunan MRT dan monorel dilakukan.

"Betap jalan. Semua izin yang berkaitan dengan provinsi kan sudah. Sekarang tinggal izin dari Menteri Pekerjaan Umum saja," jelasnya.

Proyek jalan tol sepanjang 69,77 km ini dibagi menjadi enam ruas yakni Semanan-Sunter 20,23 km, Sunter-Pulo Gebang 9,44 km, dan Duri Pulo-Kp Melayu 12,65 km. Kemudian Ujijami-Tanah Abang 8,7 km, Kemayoran-Kp Melayu 9,60 km, Pasar Minggu-Casablanca 9,15 km.

Sebelumnya, Gani mengungkapkan penandatanganan PPJT



Ruas	Panjang (Kilometer)
Semanan-Sunter	20,23
Sunter-Pulo Gebang	9,44
Duri Pulo-Kp. Melayu	12,65
Ujijami-Tanah Abang	8,70
Kemayoran-Kp. Melayu	9,60
Pasar Minggu-Casablanca	9,15

Sumber: JTD, BPTT

Berkas: Hutan

proyek itu dapat dilakukan pada bulan depan, menyusul telah terbitnya surat analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI.

"Sudah keluar dari BPLHD yang diben pelimpahan wewenang dari Gubernur," katanya. (Bisnis, 6 Jan.)

Dengan demikian, lanjutnya,

BPTT segera memanggil JTD, selaku pemegang konsesi untuk melakukan penandatanganan PPJT.

Setelah penandatanganan PPJT, badan usaha diwajibkan mencari pendanaan untuk kemudian dilakukan pembangunan fisik. "Mereka harus menyiapkan jaminan dan administrasi lainnya." (Gazette)